

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan di Kel. Bukit Biru Kec. Tenggara)

EFRI NOVIANTO

Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Kutai Kartanegara Tenggara

Abstract :

Poorness is the very complex problem so after that never been dry from the dicussion. The poorness problem are verry complexed there for cannot be seen by partial or is only seen in by one side and furgetting the othen side. Including of also in the case of solution. Some wrong decision in poorness solution not merely affecting undiminished impeccunious sosiety perception of about direct cash subsidies in poornes handling. The research approach used by writer in this research is qualitative descriptive. Tehnique analysis used follow what opened by miles and huberman that it interaktive tehnik analysis; reduce the data, presentation of data and conclusion result of research. Society perseption on of direct cash subsidies the resource person majority express not objection with the existence of the policy. While at the time that society expectation to government in overcoming poorness in chief of Bukit Biru Village is the government do the small society enableness (for example through counselling program, education, training and capital employed gift) repairing the transportation acces so that can lessen the fare produce and open the new employment.

Key word : Perception

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu visi pembangunan nasional periode 2004-2009 adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera, dengan sasaran pokok menurunkan jumlah penduduk miskin dari 16,7 persen tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 (RPJM; BPS 2005:1). Saat ini pemerintah menempuh dua strategi utama untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, yaitu dengan :

1. Meningkatkan pendapatan;

2. Menurunkan beban hidup penduduk miskin (pemberian subsidi).

Untuk mewujudkan kedua strategi diatas, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tentang Penyaluran Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada Rumah Tangga Miskin. Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (Inpres No. 12 tahun 2005).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia karena memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 4 Triliun setiap tahunnya.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga wajar apabila nominal APBD-nya juga besar karena dana perimbangan dan bagi hasilnya juga besar.

Hal yang sangat bertolak belakang dibalik sebutan sebagai daerah yang kaya adalah jumlah penduduk miskinnya 30.095 RTS (96.344 jiwa) atau 18,22 %¹ terbesar kedua setelah Samarinda di Propinsi Kalimantan Timur.

Subsidi langsung tunai (SLT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi beban penduduk miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Kelurahan Bukit Biru jaraknya \pm 7 Km dari Ibu Kota Kabupaten (Tenggarong) dan berbatasan secara langsung dengan Kecamatan lain (Loa Kulu). Masyarakat Bukit Biru merupakan peralihan dari masyarakat Desa menjadi masyarakat Kota.

Dari segi kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka menanggulangi kemiskinan bisa dikatakan cukup banyak, tapi masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara seakan tak pernah bisa diatasi. Inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat

judul “*PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI LANGSUNG TUNAI*” (*Studi Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini adalah “*Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan Subsidi Langsung Tunai dalam menanggulangi kemiskinan?*”

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah “*untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Bukit Biru terhadap Subsidi Langsung Tunai dalam mengentaskan kemiskinan*”.

II. DASAR TEORI

2.1. Persepsi

Manusia sebagai makhluk sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Pengaruh ini disebabkan oleh kejadian, pesan dan informasi yang didapat. Begitu juga dengan persepsi yang diberikan, tentunya dipengaruhi oleh kejadian, pesan dan informasi yang didapat. Menurut *Robert A. Baron dan Paul B. Paulus* (2001:167):

¹ BPS Kutai Kartanegara 2008

”...Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi kita”

Persepsi dikonsepsikan sebagai suatu *mental image* yang menyeluruh dan berkelanjutan yang terbentuk dari pengetahuan (kognisi) dan ingatan pengalaman seseorang dalam menanggapi lingkungannya dengan tujuan tertentu dan akan mendorong terjadinya suatu tindakan. Persepsi mengacu pada cara manusia menginterpretasikan dan memahami pesan yang diproses oleh sistem sensornya.

Menurut *Terence R. Mitchell* dan *James R. Larson (Donal A Norman 1975;17)*, manusia adalah makhluk yang unik secara fisik, psikologis, dan perkembangan sosial mempengaruhi pembentukan persepsi diri masing-masing. Teori yang dapat digunakan untuk menganalisa persepsi manusia antara lain:

a) ***The Direct Perception Theory;***

Pendekatan ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti *Mc Dougall, Freud, Lorenz dan James J. Gibson*. Mereka menyatakan bahwa persepsi yang membentuk perilaku manusia dipengaruhi oleh karakteristik biologisnya baik secara fisik maupun genetik. Pendekatan ini berusaha menjelaskan bahwa ada suatu bakat tertentu yang mengarahkan persepsi

seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir. Analisa dalam teori ini terfokus pada organ-organ biologis terutama sistem syaraf.

b) ***The image and Cue Theory;***

Pendekatan ini didukung oleh *Helmholtz* ini menyatakan bahwa faktor yang membentuk persepsi adalah pengalaman (*experience*), pembelajaran (*learning*) dan ingatan (*memory*). Faktor pengalaman merupakan suatu isyarat yang diperoleh dari interaksi dalam lingkungan sebagai informasi bagi pemilik persepsi, sehingga disebut sebagai *cue field*. Dibeberapa buku, teori ini sering dipecah menjadi:

- 1) Sosial *learning theory*; pendekatan ini menyatakan bahwa persepsi yang membentuk perilaku manusia dipengaruhi oleh proses belajar baik melalui proses asosiasi, paksaan maupun peniruan.
- 2) Teori insentif; pendekatan ini menyatakan bahwa persepsi yang membentuk perilaku manusia didasari oleh perhitungan untung dan rugi. Tiga teori insentif yang utama adalah;
 - a. *Rational decision-making theory* dimana manusia akan selalu memilih sesuatu yang paling menguntungkan

kan dan akan selalu berusaha memaksimalkannya.

- b. Teori pertukaran, dimana manusia akan melakukan kompromi dalam melakukan tindakan sehingga tercipta suatu keuntungan dan kerugian yang relatif melalui *win-win solution*.
- c. Teori pemuasan kebutuhan, menyatakan bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk pemenuhan kebutuhan.

2.2. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa latin *socius* yang bearti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu ‘syaraka’ yang bearti ikut serta, berpartisipasi (kata Arab “musyaraka” bearti saling bergaul, adapun kata bahasa Arab untuk masyarakat adalah (‘mujtama’).

Koentjaraningrat (1985:123). Masyarakat adalah

“...sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau “saling berinteraksi” sehingga masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”

Masyarakat Indonesia adalah sebagai contoh suatu ‘masyarakat dalam arti luas’, sedangkan masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti dadia, marga atau suku merupakan contoh dari suatu masyarakat dalam arti sempit’ (MM. Djojodisoeno 1958:21).

2.3. Kemiskinan

Ellis (dalam Suharto, 2005:133) menyatakan secara ekonomi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai:

“...kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas”.

Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolute. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2100 kalori orang/hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS orang/hari.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai:

“...kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak-dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.”

Hak-hak dasar masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset dan alat-alat produktif

seperti tanah dan lahan perkebunan atau pertanian, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang didalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan objektif atau sering disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subjektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, dalam Suharto, 2005:134).

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos 2002). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak

bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001). Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan dan pendidikan.

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Dalam konteks politik ini, Friedman mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan dan (i) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (friedman dalam Suharto 2005:135).

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan pe-

ningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis dalam Suharto (2005:135) misalnya menyatakan bahwa:

“...kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya”.

Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “*ketidakmauan*” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “*ketidakmampuan*” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-

kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Smeru dalam Suharto (2005:132) mengemukakan beberapa indikator atau ciri kemiskinan yaitu:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- 6) Ketidak-terlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 8) Ketidak-mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 9) Ketidak-mampuan dan ketidak-beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Bappenas (Sahdan 2005:4) mengemukakan beberap indikator atau ciri kemiskinan yaitu:

- 1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
- 2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 3) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.
- 4) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi.
- 5) Terbatasnya akses terhadap air bersih.
- 6) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.
- 7) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta terbatasnya akses terhadap sumber daya alam tersebut.
- 8) Lemahnya jaminan rasa aman.
- 9) Lemahnya partisipasi.
- 10) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggung jawab keluarga.

2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ada dua teori mendasar yang menjadi rujukan yaitu:

- a) Teori Neo-liberal

Teori Neo Liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, Jhon Stuar Mill. Intinya

menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Para pendukung Neo Liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan masalah individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “*residual*”, sementara dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya dan lembaga-lembaga keagamaan.

Peran Negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang hanya boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga diatas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Cheyne, O’Brien dan Belgrave, dalam Suharto 2005:138). Penerapan program-program *structural anjusement*, seperti program jaring pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sesungguhnya merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang pengentasan kemiskinan ini.

b) Teori Demokrasi-sosial

Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah

dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum demokrasi sosial.

Teori demokrasi sosial memandang bahwa masalah kemiskinan bukanlah masalah individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economic*) dan “ekonomi manajemen permintaan” (*demand-managemant economics*) gaya keynesia yang muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an.

Pendukung demokrasi sosial berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar; melainkan juga bebas menentukan pilihan (*choices*). Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu misalnya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari keku-

rangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka memenuhi menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kemiskinan kepada masyarakat dan LSM bukan saja tidak efektif, melainkan pula mengingkari kewajiban Negara dalam melindungi warganya.

Menurut pandangan demokrasi sosial, strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat *institutional* (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut AS, Eropa Barat dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori demokrasi sosial. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun misalnya dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihan (*choices*). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (Suharto, 2005:140).

Kebijakan Subsidi Langsung Tunai merupakan gabungan dari kedua teori pengentasan kemiskinan diatas, dimana peran Negara sebagai institusi terlihat dalam campur tangan pemerintah dengan memberikan subsidi kepada rumah tangga miskin dalam bentuk tunai yang juga tidak melupakan peran LSM atau ormas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.5. Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Subsidi Langsung Tunai adalah suatu kebijakan pemerintah memberikan subsidi (bantuan) kepada rumah tangga miskin secara langsung dengan kriteria-kriteria tertentu sebagai kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). SLT diberikan dalam bentuk tunai (Rp. 300.000) setiap tiga bulan sekali kepada rumah tangga miskin setelah dilakukan pendataan oleh petugas BPS dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria Rumah Tangga Miskin yang layak mendapat SLT (BPS, 2005) adalah:

- 1) Luas Lantai Bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
- 3) Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/

- kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plaster.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 - 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
 - 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
 - 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang /minyak tanah.
 - 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
 - 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
 - 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
 - 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
 - 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai

minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah): seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

- 15) Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/ Polri atau pensiunan PNS/ TNI/ Polri.
- 16) Bukan pengungsi yang diurus oleh pemerintah.
- 17) Bukan penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal.

Berdasarkan kriteria diatas, BPS telah melakukan pendataan dan didapatkan data rumah tangga miskin yang layak menerima SLT di Kutai Kartanegara sebanyak 34.888 rumah tangga miskin yang tersebar di 18 Kecamatan.

Tabel 1: Masyarakat Penerima SLT Kelurahan Bukit Biru.

No	RT	Total
1	I	11
2	II	19
3	III	19
4	IV	20
5	V	16
6	VI	14
7	VII	7
8	VIII	5
9	IX	15
10	X	5
11	XI A	18
12	XI B	19
13	XII	6
14	XIII	23
15	XIV	18

16	XV	15
17	XVI	18
18	XVII	18
19	XVIII	15
20	XIX	14
21	XX	15
Total		310

Sumber data: hasil Sensus BPS Kutai Kartanegara

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif yaitu:

“...penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variable yang lain”.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap subsidi langsung tunai dalam mengentaskan kemiskinan secara mendalam maka digunakanlah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution dalam Sugiyono, 2005).

Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah orang, yaitu masyarakat Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai latar belakang yang

berkaitan dengan persepsinya terhadap penyaluran subsidi langsung tunai (SLT).

3.2. Sumber Data

Nara Sumber penelitian adalah Lurah Kelurahan Bukit Biru, Tokoh Masyarakat Kelurahan Bukit Biru dan Warga Kelurahan Bukit Biru baik yang menerima SLT maupun tidak dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* sebagai sumber data primer. Sedangkan sebagai sumber data sekunder, penulis dapatkan dari wawancara dengan pejabat Badan Pusat Statistik dan PT. Pos Indonesia cabang Kutai Kartanegara, foto, serta file dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan SLT di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong.

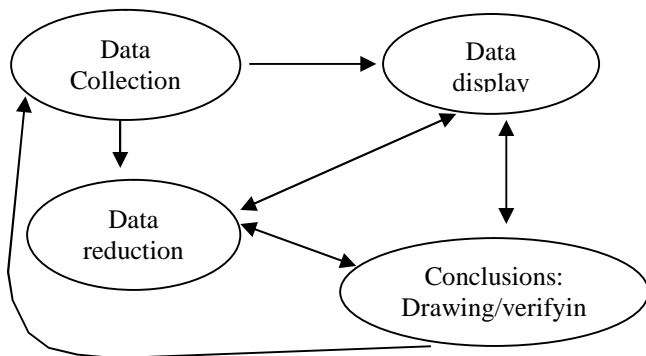
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Wawancara Mendalam (*indep Interview*) dan studi dokumentasi.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2005:91), mengemukakan bahwa:

“...aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian

sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh”.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (interaktif model)

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Persepsi Masyarakat Tentang Subsidi Langsung Tunai

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa kebijakan subsidi langsung tunai (SLT) terkait erat dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Mengenai persepsi masyarakat mengenai SLT, mayoritas nara sumber menyatakan tidak keberatan dengan program penyaluran SLT dengan memberikan saran:

- 1) Agar petugas betul-betul turun kelapangan untuk memastikan bahwa rumah tangga miskin tersebut memang layak untuk menerima SLT;
- 2) Di alihkan dalam bentuk program semisal UKM, modal usaha dan membuka lapangan kerja baru;
- 3) Di tambah nominalnya dan dibagikan setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan profil desa dan hasil temuan lapangan bahwa usia kerja produktif masyarakat usia 20-39 tahun berjumlah \pm 821 jiwa dengan mayoritas berprofesi sebagai buruh tani. Dari data BPS juga menyebutkan bahwa rumah tangga miskin di Kelurahan Bukit Biru yang layak menerima SLT sebanyak 237 dari 3.891 rumah tangga miskin, menempati peringkat ke 10 rumah tangga miskin penerima SLT dari 13 Kelurahan se-Kecamatan Tenggara. Karena pihak Kelurahan hanya sebagai fasilitator dalam menentukan rumah tangga miskin yang layak menerima SLT, maka ditemukan bahwa dari 237 rumah tangga miskin ini ada yang tidak layak menerima apabila mengacu kepada kriteria rumah tangga miskin yang telah ditetapkan oleh BPS.

Berdasarkan profil desa juga ditemukan bahwa fasilitas yang dimiliki masyarakat Kelurahan Bukit Biru sangat banyak. Mengenai keberadaan SLT tidak begitu membantu mengurangi beban penduduk miskin. Dua saran yang diajukan oleh nara sumber menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap SLT, tetapi tetap tidak merasa keberatan dengan SLT. Berdasarkan teori insentif yang dikemukakan oleh *Helmholtz* bahwa persepsi yang membentuk perilaku manusia didasari oleh perhitungan untung dan rugi. Persepsi manusia akan cenderung negatif (menolak) apabila merugikan, begitu juga sebaliknya

persepsi manusia akan cenderung positif apabila menguntungkan.

4.2. Harapan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Bukit Biru

Harapan sangat berkaitan dengan langka-langka kedepan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Bukit Biru. Meminta pendapat penduduk setempat tentunya lebih efektif dari pada hanya sekedar menganalisa tanpa turun kelapangan sehingga mengetahui persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh penduduk setempat. Kemiskinan daerah satu dengan daerah lain tentunya berbeda. Untuk itu menyeragamkan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan bukan saja tidak efektif tetapi juga dapat menimbulkan persoalan baru yang bisa saja berdampak sebaliknya, bukan membantu dalam pengentasan kemiskinan, tetapi menambah jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah.

Menurut *David Berry* (1982: 62) bahwa harapan terbagi dalam dua hal yaitu harapan prediktif (apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang) dan harapan preskriptif (apa yang seharusnya dilakukan orang). Dari hasil penelitian, nara sumber berharap dalam mengentaskan kemiskinan hendaknya pemerintah:

1) Melakukan pemberdayaan masyarakat kecil misalnya melalui program penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pemberian modal usaha;

- 2) Melakukan pembangunan pedesaan utamanya jalan untuk mempermudah akses transportasi sehingga dapat mengurangi ongkos produksi;
- 3) Membuka lapangan kerja;
- 4) Turun langsung kelapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Dari hasil temuan dilapangan yang penulis dapatkan bahwa program pemberdayaan seperti penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pemberian modal usaha tidak ada sama sekali. Seandainya diadakan program pemberdayaan, hendaknya disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh warga tersebut.

Mengenai akses transportasi di Kelurahan Bukit Biru adalah menggunakan ojek (sepeda motor), dengan medan yang berbukit-bukit. Ongkos ojek di kelurahan Bukit Biru berada di kisaran Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-.

Profesi mayoritas penduduk Kelurahan Bukit Biru adalah petani dan buruh bangunan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan lahan pertanian yang terus menyempit, tentunya membuka lapangan kerja baru sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Petugas pendata rumah tangga miskin selama ini dalam menetapkan penerima Subsidi Langsung Tunai hanya berdasarkan data yang diberikan dari RT tanpa mengecek kembali kebenaran data tersebut. Sehingga kemungkinan SLT tidak tepat sasaran itu besar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Subsidi Langsung Tunai tidak bisa dijadikan program penanggulangan kemiskinan;
- 2) Mayoritas nara sumber yang penulis wawancarai menyatakan tidak keberatan dengan kebijakan Subsidi Langsung Tunai hanya saja dinilai masih kurang efektif. Untuk itu nara sumber berharap agar petugas betul-betul turun kelapangan untuk memastikan bahwa rumah tangga miskin tersebut memang layak untuk menerima SLT dan di tambah nominalnya sehingga bisa dijadikan modal usaha dan membuka lapangan kerja baru.
- 3) Masyarakat Kelurahan Bukit Biru berharap kepada pemerintah agar dalam menanggulangi kemiskinan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin (misalnya melalui program penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pemberian modal usaha), melakukan pembangunan pedesaan utamanya

jalan untuk mempermudah akses transportasi sehingga dapat mengurangi ongkos produksi, membuka lapangan kerja baru serta turun langsung kelapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

4.2. Saran

- 1) Pemerintah dalam menetapkan orang miskin atau rumah tangga miskin hendaknya berdasarkan teori bukan berdasarkan kebijakan.
- 2) Pemerintah diharapkan melakukan upaya transparansi apabila menaikkan harga bahan bakar minyak, mengadakan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang yang lain serta memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin yang sebanding.
- 3) Pemerintah hendaknya memaksimalkan sosialisasi kemasyarakatan sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut. Sosialisasi ini hendaknya bisa dikemas dengan baik sehingga bisa membuat persepsi terhadap kebijakan pemerintah tersebut juga baik dan mendapat dukungan masyarakat.
- 4) Badan Pusat Statistik (BPS), hendaknya bisa melibatkan pejabat yang berwenang pada tingkatan bawah seperti Lurah, RW dan RT untuk mendata siapa yang layak menerima SLT.

Mereka semua lebih mengetahui keadaan daerahnya dan masyarakat di daerahnya juga akan lebih terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan karena kedekatan emosional dan intensitas pertemuannya relatif lebih sering.

- 5) Petugas pendata rumah tangga miskin (BPS) dalam melakukan pendataan, hendaknya turun langsung kelapangan untuk melihat langsung warga miskin di Kelurahan Biru, sehingga SLT yang diberikan bisa tepat sasaran.
- 6) Pemerintah hendaknya bisa meningkatkan nominal dana SLT yang dibagikan kepada rumah tangga miskin, sehingga bisa dijadikan modal usaha. Modal usaha inilah yang akan membuka lapangan kerja baru yang tentunya bisa mengurangi angka pengangguran dan masyarakat miskin.
- 7) Pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, hendaknya dilakukan dengan program pemberdayaan bagi masyarakat miskin misalnya melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki warga miskin serta pembangunan jalan untuk mempermudah akses transportasi untuk menanggulangi isolasi arus barang dan jasa sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry. David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, CV. Rajawali. Jakarta, 1982.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- , *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Atropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- MM. Djojodisoeno, *Azas-Azas Sosiologi*, Jajasan Badan Penerbit Gadjja Mada, Yokyakarta, 1958.
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Suara Babas, Jakarta, 2006.
- Strauss. Anselm dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 2001.
- Sugiyono,., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- , *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003.